



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI**

KEGIATAN

Masa Reses I Tahun Sidang 2024-2025 (6 Desember 2024 – 20 Januari 2025)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEAHLIAN

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	1
KOMISI II	2
A. FUNGSI LEGISLASI	2
B. FUNGSI ANGGARAN	2
C. FUNGSI PENGAWASAN	2
KOMISI III	3
A. FUNGSI LEGISLASI	3
B. FUNGSI ANGGARAN	3
C. FUNGSI PENGAWASAN	3
KOMISI IV	7
A. FUNGSI LEGISLASI	7
B. FUNGSI ANGGARAN	7
C. FUNGSI PENGAWASAN	7

KOMISI V	10
A. FUNGSI LEGISLASI	10
B. FUNGSI ANGGARAN	10
C. FUNGSI PENGAWASAN	10
KOMISI VI	12
A. FUNGSI LEGISLASI	12
B. FUNGSI ANGGARAN	12
C. FUNGSI PENGAWASAN	12
KOMISI VII	13
A. FUNGSI LEGISLASI	13
B. FUNGSI ANGGARAN	13
C. FUNGSI PENGAWASAN	13
KOMISI VIII	18
A. FUNGSI LEGISLASI	18
B. FUNGSI ANGGARAN	18
C. FUNGSI PENGAWASAN	18
KOMISI IX	41
A. FUNGSI LEGISLASI	41

B. FUNGSI ANGGARAN	41
C. FUNGSI PENGAWASAN	41
KOMISI X	43
A. FUNGSI LEGISLASI	43
B. FUNGSI ANGGARAN	43
C. FUNGSI PENGAWASAN	43
KOMISI XI	49
A. FUNGSI LEGISLASI	49
B. FUNGSI ANGGARAN	49
C. FUNGSI PENGAWASAN	49
KOMISI XII	50
A. FUNGSI LEGISLASI	50
B. FUNGSI ANGGARAN	50
C. FUNGSI PENGAWASAN	50
KOMISI XIII	51
A. FUNGSI LEGISLASI	51
B. FUNGSI ANGGARAN	51
C. FUNGSI PENGAWASAN	51

BADAN LEGISLASI	54
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	58
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	67
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	68
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	69
BADAN ASPIRASI MASYARAKAT	71

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Luar Negeri	<i>Courtesy Call</i> dilaksanakan pada 6 Januari 2025.	Menerima Kunjungan Kehormatan Delegasi Anggota Parlemen Swedia.	
2.		<i>Courtesy Call</i> dilaksanakan pada 20 Januari 2025.	Menerima Kunjungan Kehormatan Dubes Kerajaan Yordania.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Pemerintah Daerah b. Kementerian ATR/BPN c. Kementerian Dalam Negeri d. KPU e. Bawaslu	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 6 – 10 Desember 2024.	Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 – 2025 ke Provinsi Jawa Timur dan D. I. Yogyakarta.	
2.	a. Pemerintah Daerah b. Kementerian ATR/BPN c. Kementerian Dalam Negeri	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau a. Kebijakan pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 9 – 13 Desember 2024.	Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 – 2025 ke Provinsi Sumatera Selatan.	.

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)	RDP dengan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, tanggal 2 Desember 2024.	Menindaklanjuti Surat Komisi III DPR RI yang ditujukan kepada Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Nomor B/75-DW/KOM.III/MP.I/11/2024 tertanggal 6 November 2024 perihal Penyusunan NA & RUU, maka pada tanggal 2 Desember 2024 Komisi III DPR RI melaksanakan rapat dengan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, guna membahas penyusunan draf RKUHAP.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kepolisian Daerah 2. Kejaksaan Tinggi 3. BNN Provinsi 4. 4 (empat) Peradilan Tingkat Banding dan Pertama (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer)	Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi: 1. Sulawesi Tenggara, tanggal 6 s.d. 10 Desember 2024; 2. Jambi, tanggal 6 s.d. 10 Desember 2024; dan 3. Jawa Barat, tanggal 21 s.d. 25 Desember 2024.	Sesuai Keputusan Rapat Intern tanggal 23 Oktober 2024, Komisi III DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses MP I TS 2024-2025.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	1. Kapolda Kalimantan Tengah 2. Kapolres Metro Jakarta Timur 3. Sdri. Dwi Ayu dan Kuasa Hukumnya	RDP dan RDPU Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 11.00 WIB, membahas: 1. Pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Anggota Polresta Palangkaraya. 2. Kasus penganiayaan seorang karyawan toko roti di Jl Raya Penggilingan Cakung Jaktim.	Kesimpulan : 1. Komisi III DPR RI meminta Kapolres Metro Jakarta Timur menindaklanjuti laporan saudari Dwi Ayu Darmawati terhadap saudara GSH dengan Laporan Polisi No: LP/B/3414/X/2024/SPKT/RJT/PMJ pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan melakukan proses hukum yang adil, profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Komisi III DPR RI meminta kepada Polres Metro Jakarta Timur dan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti segala jenis bentuk pelanggaran hukum yang terjadi tanpa menunggu viral terlebih dahulu di media sosial. 3. Komisi III DPR RI mengapresiasi Polda Kalimantan Tengah yang memberikan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) terhadap Brigadir AK dalam sidang kode etik profesi yang dilakukan pada 16 Desember 2024. 4. Komisi III DPR RI meminta Kapolda Kalimantan Tengah untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan warga sipil yang dilakukan oleh oknum Polresta Palangka Raya dengan Laporan Polisi No: LP/A/13/XII/2024.SPKT.SatReskrim/Polresta Palangkaraya/Polda Kalteng pada tanggal 11 Desember 2024 secara profesional, akuntabel, transparan dan berkeadilan.	
3.	Reza Artamevia dan Ratna Dewi serta Kuasa Hukumnya.	RDPU Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 13.00	Rekomendasi Koomisi III DPR RI: 1. Komisi III DPR RI meminta Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan gelar perkara khusus	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		WIB, membahas laporan dugaan pemalsuan berlian.	<p>terhadap Laporan Informasi No. LI/202/XI/RES.1.11./2024/Subdit I tertanggal 13 November 2024, serta Laporan Polisi terkait lainnya (Laporan Polisi Nomor LP/B/6928/XI/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 15 November 2024 dan LP Nomor LP/B/7235/II/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 28 November 2024) secara terbuka, adil, dan profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>2. Komisi III DPR RI merekomendasikan agar perkara tersebut di atas ditangani oleh Bareskrim Polri agar penanganannya lebih efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	
4.	Sdr. Yudi Setiasno dan Kuasa Hukumnya	RDPU Komisi III DPR RI dilaksanakan tanggal 19 Desember 2024 pukul. 15.00 WIB, membahas Penganiayaan, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dibawah umur serta percobaan pembunuhan.	<p>Rekomendasi Komisi III DPR RI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI meminta Kapolda Jawa Tengah untuk segera menindaklanjuti Surat Pengaduan Nomor STB/391/X/2017/Reskrim tertanggal 3 Oktober 2017 terkait kasus kekerasan seksual dengan korban Sdri. ADW dan Ananda KDY. 2. Komisi III DPR RI meminta Kapolda Jawa Tengah dan Kapolresta Surakarta untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oknum penyidik di PPA Polresta Surakarta dalam penanganan kasus tersebut. 3. Komisi III DPR RI akan menyampaikan perihal perlindungan dan pendampingan korban kepada LPSK. 	
5.	Konferensi Pers Ketua Komisi III DPR RI "Catatan Akhir Tahun Komisi III DPR RI terkait Mitra Kerja Komisi III DPR RI"		Dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Desember 2024 pukul 14.30 WIB.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	<ol style="list-style-type: none"> Sdri. Arimbi Dwi Widayanti dan kuasa hukum serta menghadirkan Kopol. Hastin Marhadjanti, S.Psi (Kanit PPA yang menangani perkara Th 2017) dan AKP. Wahyu Riyadi, SH (Penyidik Yang Menangani Perkara Th 2017); Sdr. Yudi Setiasno dan kuasa hukum. Sdr. Baringin Pangabean 	<p>RDPU Komisi III DPR RI dilaksanakan tanggal 30 Desember 2024 pukul 13.00 WIB, membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyampaian perkembangan kasus kekerasan seksual dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak di Surakarta. Permohonan penangguhan eksekusi rumah dari PN Jakpus. 	<p>Komisi III DPR RI telah menerima pengaduan Sdr. Baringin M.H. Pangabean pada tanggal 30 Desember 2025 dan merekomendasikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komisi III DPR RI meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menangguhkan atau tidak melaksanakan eksekusi Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 554 PK/Pdt/2024 jo. 3351 K/Pdt/2020 jo 392/Pdt/2021/PT DKI jo. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst karena adanya cacat hukum dalam putusan PK sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusinya. Komisi III DPR RI menerima penjelasan bahwa kedua belah pihak sedang melakukan penyelesaian melalui upaya perdamaian. Komisi III DPR RI meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tidak mendukung pengamanan terhadap rencana eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. 	
7.	<ol style="list-style-type: none"> Kuasa Hukum dari Perkumpulan Tempatan (Perpat) Bangka Belitung Perwakilan Pekerja PHK Sepihak PT. Freeport Indonesia 	<p>RDPU Komisi III DPR RI dilaksanakan tanggal 15 Januari 2025, membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Permasalahan mega korupsi tata niaga timah senilai Rp.271 Triliun. Ribuan pekerja korban PHK Sepihak PT. <i>Freeport</i> Indonesia. 	<p>Dalam pertemuan ini Ketua Komisi III DPR RI menyampaikan beberapa hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> bahwa Komisi III DPR RI akan mengundang semua satker yang ada di Kejaksaan RI, seperti Jampidsus, Jamdatun, dll. Komisi III DPR RI tidak memberikan rekomendasi apapun, sebelum para pihak melengkapi data-datanya. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Gubernur Kalimantan Tengah; 2. Pj. Bupati Kapuas; 3. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian; 4. Plt. Dirjen Lahan dan irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian; 5. Dirjen Tanaman Pangan Pertanian, Kementerian Pertanian; 6. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian; 7. Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan 8. Dirjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan 9. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Ke Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada 6 s.d. 10 Desember 2024.	1. Diskusi dan peninjauan lokasi area optimalisasi lahan/ <i>Food Estate</i> di Desa Dadahub, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah. 2. Diskusi dan peninjauan dengan Kelompok Pembudidaya Ikan Basarang Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.	-

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	10. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional; 11. Direksi Perum Bulog; 12. Direksi PT Pupuk Indonesia; 13. Direksi ID Food; 14. Kepala Dinas tanaman pangan, hortikultura danperternakan provinsi Kalimantan Tengah; 15. Kepala Dinas pertanian Kabupaten Kapuas; 16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah 17. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IIPalangkaraya, Kementerian PUPR; serta 18. Penyuluh, Brigade pangan, dan Gapoktan Desa Dadahub			
2.	1. Pj Gubernur Papua Selatan 2. Kepala Badan Pangan Nasional 3. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 4. Plt Direktur Jenderal Irigasi dan Lahan Kementerian Pertanian. 5. Plt Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. 6. Direksi Perum Bulog 7. Direksi PT Pupuk Indonesia 8. Direksi ID Food. 9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan (TPPKP) Provinsi Papua Selatan.	Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Papua Selatan dilaksanakan pada 6 s.d. 10 Desember 2024.	1. Meninjau dan melakukan kegiatan panen pada serta presentasi mengenai upaya peningkatan produksi pangan untuk mendukung target swasembada pangan di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik Provinsi Papua Selatan. 2. Peninjauan dan diskusi persiapan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Program <i>Technical Cooperation Guideline</i> (TCG) Kerjasama Indonesia-China di Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke (SKPT Merauke).	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	10. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke. 11. Petani, Penyuluh Pertanian			
3	1. Gubernur Bali; 2. Walikota Denpasar; 3. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove; 4. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Kehutanan; 5. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali; 7. Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Denpasar; dan 8. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.	Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Bali dilaksanakan pada 6 s.d. 10 Desember 2024.	1. Peninjauan dan Diskusi mengenai Alih fungsi lahan persawahan di Subak Kerdung, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan. 2. Peninjauan dan Diskusi mengenai Strategi peningkatan konsumsi ikan masyarakat bali menuju generasi emas 2045 di Lokasi Riset Perikanan Tuna, di Kecamatan Denpasar Selatan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Bina Marga & BPJT, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi) 2. Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Perkeretaapian), Angkasa Pura, Integrasi Aviasi Solusi, PELINDO, PELNI, KAI, ASDP 3. BMKG 4. BASARNAS 5. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 6. Kementerian Transmigrasi 7. Kementerian Perumahan	Kunker Reses dilaksanakan pada tanggal 6 - 10 Desember 2024.	1. Kunjungan kerja Reses ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur; 2. kerja Reses ke Kabupaten Fak-fak Provinsi Papua Barat; 3. Kunjungan kerja Reses ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	DPRD Pontianak	Audiensi dilaksanakan pada tanggal Rabu, 11 Desember 2024.	Konsultasi tentang Normalisasi alur Sungai Kapuas.	
3.	DPRD Wajo	Audiensi dilaksanakan pada tanggal Rabu, 11 Desember 2024.	Kebijakan Alokasi Anggaran Pusat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten/Kota.	
4.	DPRD Sulawesi Tengah	Audiensi dilaksanakan pada tanggal Kamis, 12 Desember 2024.	Konsultasi dan koordinasi terkait pembangunan dan perbaikan jalan nasional di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.	
5.	DPRD Kab. Bolang Mongondow	Audiensi dilaksanakan pada tanggal Jum'at, 13 Desember 2024.	Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025.	
6.	DPRD Kota Jambi	Audiensi dilaksanakan pada tanggal Jum'at, 24 Desember 2024.	Fungsi dan Tujuan pembangunan Jalan Tol Di Provinsi Jambi.	
7.	DPRD Kabupaten Cilacap	Audiensi dilaksanakan pada tanggal Rabu, 8 Januari 2025.	Rencana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional Tahun 2026 Di Kabupaten Cilacap.	
8.	DPRD Provinsi NTB	Audiensi dilaksanakan pada tanggal Kamis, 9 Januari 2025.	Rancangan Peraturan Daerah Prov. NTB tentang jasa konstruksi.	
9.	DPRD Kab. Kebumen	Audiensi dilaksanakan pada tanggal Senin, 13 Januari 2025.	Konsultasi terkait Infrastruktur Pembangunan Daerah Tahun 2025.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN	Rapat Kerja Tingkat 1 dengan Menteri BUMN RI, Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI dan Menteri Sekretaris Negara RI dilaksanakan tanggal 23 Januari 2025	1. Penjelasan Komisi VI terkait Penugasan Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. 2. Penyampaian Pandangan Presiden. 3. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Komisi VI DPR RI	Rapat Pimpinan dilaksanakan tanggal 21 Januari 2025.	Penyusunan dan Pembahasan Program Kerja Komisi VI DPR RI MP. II TS. 2024-2025.	
2.	Komisi VI DPR RI	Rapat Intern dilaksanakan tanggal 22 Januari 2025.	Penetapan Program Kerja Komisi VI DPR RI MP. II TS. 2024-2025.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I	<p>Kunjungan Kerja Reses Komisi VII Ke Provinsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Sumatera Selatan 2. Provinsi Sumatera Barat 3. Provinsi Bali <p>Dilaksanakan pada Jumat s.d. Selasa, 6 s.d. 10 Desember 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI di Provinsi Sumatera Selatan bertujuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan informasi tentang pendidikan, SDM, dan riset pariwisata dari Politeknik Pariwisata Palembang. b. Mengidentifikasi tantangan, kendala, dan dukungan untuk pengembangan desa wisata. c. Mengidentifikasi tantangan, kendala, dan dukungan untuk penguatan UMKM dan Industri Kreatif pariwisata, khususnya kain tenun songket. <p>Pelaksanaan kunjungan kerja reses oleh Komisi VII DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, menghasilkan beberapa catatan dan rekomendasi penting.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kolaborasi Pentahelix: Diperlukan peningkatan kolaborasi antara berbagai pihak, seperti Kementerian, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, untuk mengatasi masalah di desa wisata. 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>b. Perbaikan Kurasi Desa Wisata: Kementerian Pariwisata perlu memperbaiki metode dalam penetapan desa wisata agar sesuai dengan kondisi nyata.</p> <p>c. Pedoman Standardisasi: Diperlukan perbaikan pedoman desa wisata untuk menetapkan aturan dan parameter yang jelas.</p> <p>d. Pengembangan SDM: Kementerian Pariwisata perlu mengoptimalkan komunikasi dengan Politeknik Pariwisata Palembang untuk meningkatkan SDM.</p> <p>e. Evaluasi Program Studi: Penting bagi Politeknik Pariwisata Palembang untuk mengevaluasi program studi agar sesuai dengan kebutuhan industri.</p> <p>Kesimpulan: Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan desa wisata dan industri pariwisata di Sumatera Selatan melalui kolaborasi dan perbaikan sistem yang ada.</p> <p>2. Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI di Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk melaksanakan pengawasan Komisi VII DPR RI di Kota Padang, Sumatera Barat, antara lain:</p> <p>a. Mendapatkan informasi tentang kinerja industri non-migas di wilayah layanan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang, termasuk aspek produksi, produktivitas, efisiensi, dan teknologi.</p> <p>b. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi industri non-migas di wilayah tersebut terkait peningkatan kinerja.</p> <p>c. Mendapatkan informasi tentang kendala yang dihadapi Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim dalam meningkatkan kinerja industri.</p>	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke BSPJI Padang dan Kawasan Batik Minang menghasilkan beberapa rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk evaluasi pasar demi menjaga kualitas dan standar produk. b. Perlunya peningkatan sosialisasi layanan seperti standarisasi dan sertifikasi kepada pelaku UMKM. c. Mendorong Kementerian UMKM untuk meningkatkan akses permodalan dan fasilitasi program bantuan bagi UMKM. d. Mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Sumatera Barat. <p>Rekomendasi ini bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha di kawasan tersebut.</p> <p>3. Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI di Provinsi Bali bertujuan untuk melaksanakan pengawasan Komisi VII DPR RI bertujuan untuk mengawasi pengembangan pariwisata, UMKM, wirausaha, dan industrinya di Provinsi Bali. Tujuan khususnya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperoleh informasi tentang pendidikan, SDM, dan riset di Politeknik Pariwisata Bali. b. Memperoleh informasi mengenai tantangan dan dukungan untuk UMKM dan wirausahawan di Bali. c. Memperoleh informasi mengenai tantangan dan dukungan untuk industri MMEA di Bali. <p>Catatan dan rekomendasi: Pelaksanaan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Politeknik Pariwisata Bali, PT. Arpan Bali Utama (Hatten Wines), dan Krisna</p>	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Oleh-Oleh menghasilkan beberapa catatan dan rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tim kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI mendesak Poltekpar Bali untuk mengembangkan pariwisata fokus pada acara besar, mempelajari dugaan <i>overtourism</i>, menghasilkan SDM berkompeten, meningkatkan digitalisasi konferensi, memanfaatkan media sosial untuk promosi, dan melakukan kajian tren pariwisata. b. Tim kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI juga memberi catatan kepada PT. Arpan Bali Utama dan Direktorat Jenderal Agro Kementerian Perindustrian, menekankan regulasi untuk produk lokal di <i>hospitality</i> dan mendorong penelitian industri wine. Mereka mengharapkan kolaborasi dengan institusi pendidikan untuk mencetak ahli <i>wine</i> lokal serta mendukung penguatan industri wine yang bermanfaat untuk ekonomi dan pendidikan masyarakat. <p>Tim kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI mendorong Krisna Oleh-Oleh dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memperluas pasar, memberi pendampingan pada UMKM, memanfaatkan <i>platform</i> digital, dan meningkatkan kualitas serta akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah.</p>	
2.	Kementerian Perindustrian RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi terkait kegiatan Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Perindustrian RI 2. Lain-lain 	Sekretariat Komisi VII DPR RI melakukan koordinasi dengan penghubung dari Kementerian Perindustrian RI dan membahas program kegiatan Kementerian Perindustrian RI dan lain-lain.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Dilaksanakan pada hari Kamis 16 Januari 2025, pukul 09.30 WIB.</p>		
3.	Kementerian UMKM RI	<p>1. Rapat Koordinasi terkait kegiatan Komisi VII DPR RI dengan Kementerian UMKM RI; 2. Lain-lain.</p> <p>Dilaksanakan pada hari Jumat 17 Januari 2025, pukul 10.00 WIB.</p>	<p>Sekretariat Komisi VII DPR RI melakukan koordinasi dengan penghubung dari Kementerian UMKM RI dan membahas program kegiatan Kementerian UMKM RI dan lain-lain.</p>	
4.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI	<p>1. Rapat Koordinasi terkait kegiatan Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI; 2. Lain-lain.</p> <p>Dilaksanakan pada hari Senin 20 Januari 2025, pukul 14.00 WIB.</p>	<p>Sekretariat Komisi VII DPR RI melakukan koordinasi dengan penghubung dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan membahas program kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan lain-lain.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Agama RI dan Kepala BPH	Raker Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada Senin, 30 Desember 2024, Pukul 10.38 s.d. 13.12 WIB dengan agenda: 1. Pembicaraan Pendahuluan BPIH Tahun 1446 H/2025 M; 2. Pembentukan Panja BPIH Tahun 1446 H/2025 M.	Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI dengan agenda: “Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja) BPIH Tahun 1446 H/2025 M” , dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI telah mendapat penjelasan dari Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI mengenai: a. Kuota haji sebanyak 221.000 jemaah terdiri dari: 1) Regular murni sebanyak 201.063 jemaah. 2) Petugas Haji Daerah (PHD) sebanyak 1.572 jemaah. 3) Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sebanyak 685 pembimbing.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>b. Jemaah haji khusus sebanyak 17.680 jemaah sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.</p> <p>2. Komisi VIII DPR RI telah mendapat penjelasan dari Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI terkait usulan:</p> <p>a. BPIH untuk jemaah haji reguler tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp 93.389.684,99 (<i>sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat koma sembilan puluh sembilan rupiah</i>) dengan komposisi Bipih sebesar Rp 65.372.779,49 (<i>enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh sembilan rupiah</i>) atau 70% dari BPIH dan Nilai Manfaat sebesar Rp 28.016.905,50 (<i>dua puluh delapan juta enam belas ribu sembilan ratus lima koma lima puluh rupiah</i>) atau 30% dari BPIH.</p> <p>b. Pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1446 H/2025 M yang bersumber dari Nilai Manfaat sebesar Rp 9.490.138.000 (<i>sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah</i>).</p> <p>3. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui penggunaan uang muka yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk membayar pemesanan zona (<i>first pay</i></p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>first serve</i>) tenda di Armuzna sebesar SAR159.250.390 (<i>seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh riyal</i>) untuk 203.320 jemaah dengan harga rata-rata tenda perjemaah sebesar SAR783,25 (<i>tujuh ratus delapan puluh tiga koma dua puluh lima riyal</i>).</p> <p>4. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI bersepakat membentuk Panja tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M dengan melibatkan Badan Penyelenggara Haji RI, dan secepatnya akan memulai pembahasan asumsi dasar dan komponen BPIH secara intensif dan detail.</p>	
2.	Dirjen PHU dan Kepala BPH	RDP Panja BPIH Tahun 1446 H/2025 M Komisi VIII dilaksanakan pada Senin, 30 Desember 2024, pukul 13.22 s.d. 13.34 WIB dengan agenda Penetapan Anggota Panja BPIH Tahun 1446 H/2025 M.	<p>Pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M dengan Panja Pemerintah dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1446 H/2025 M terdiri dari 21 Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI serta dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abdul Wachid (daftar nama terlampir). 2. Panja Pemerintah RI dipimpin oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Prof. Hilman Latief (daftar nama Panja Pemerintah terlampir). 3. Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah RI sepakat untuk memulai Rapat Panja mulai tanggal 2 dan 3 Januari 2025 di Gedung DPR RI. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			4. Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah RI sepakat untuk menyelesaikan pembahasan BPIH Tahun 1446 H/2025 M pada tanggal 10 Januari 2025.	
3.	Dirjen PHU Kemenag RI dan Kepala BPH	RDP Panja BPIH Komisi VIII DPR RI Tahun 1446 H/2025 M dilaksanakan pada Kamis, 2 Januari 2025 Pukul 13.43 s/d 16.44 WIB dengan agenda Pembahasan Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M.	<p>Pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M dengan Panja Pemerintah yang membahas: Komponen BPIH Tahun 1446 H/2025 M, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Pemerintah menjelaskan bahwa asumsi dasar BPIH tahun 1446 H/2025 M adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah kuota sebanyak 221.000 jemaah yang dibagi untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kouta haji reguler sebanyak 203.320 jemaah yang terdiri dari: reguler murni sebanyak 201.063 jemaah, Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) sebanyak 1.572 jemaah, dan Tim Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sebanyak 685 jemaah. 2) Kuota haji khusus sebanyak 17.680 jemaah. b. Kurs rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) adalah Rp16.000,00 (<i>enam belas ribu rupiah</i>) dan kurs rupiah terhadap Saudi Arabiya Riyal (SAR) adalah Rp4.266,67. (<i>empat ribu dua ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah</i>) c. Jumlah kloter untuk jemaah haji reguler sebanyak 554 kloter d. Volume makan di Makkah sebanyak 84 kali dan di Madinah sebanyak 27 kali. e. Manasik di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) direncanakan sebanyak 8 kali (untuk wilayah luar jawa) 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dan 6 kali (untuk wilayah jawa), sedang manasik di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota direncanakan sebanyak 2 kali.</p> <p>2. Kuota petugas haji yang sudah didapat hingga sekarang adalah 2.210 petugas. Karena masih kurang, maka masih diusulkan kepada Pemerintah Arab Saudi penambahan kuota petugas sebanyak 4.700 petugas sama dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M atau 4.600 petugas sama dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M.</p> <p>3. Panja Pemerintah mengusulkan BPIH tahun 1446 H/2025 M adalah rata-rata perjemaah sebesar Rp93.389.684,99 (<i>sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat koma sembilan puluh sembilan rupiah</i>) dengan komposisi yang bersumber dari: Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BiPiH) sebesar Rp65.372.772,49 (<i>enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah</i>) (70%) dan Nilai Manfaat hasil pengelolaan keuangan haji sebesar Rp28.016.905,50 (<i>dua puluh delapan juta enam belas ribu sembilan ratus lima koma lima puluh rupiah</i>) (30%).</p> <p>4. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1446 H/2025 M mendesak Panja Pemerintah untuk:</p> <p>a. Menelaah kembali biaya komponen BPIH yang diusulkan, seperti mengkaji kembali usulan biaya penerbangan haji, transportasi, konsumsi, akomodasi, manasik, dan Masyair dengan tujuan agar BPIH Tahun 1446 H/2025 M dapat diturunkan kembali.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> b. Mengkaji kembali usulan komposisi BPIH Tahun 1446 H/2025 M antara yang bersumber dari BiPih sebanyak 70 % dan Nilai Manfaat sebanyak 30 %. c. Memastikan petugas haji adalah profesional, dalam artian memberikan pembinaan, perlindungan, dan pelayanan kepada kepada jemaah haji secara maksimal. d. Biaya <i>istitha'ah</i> kesehatan haji harus sama untuk seluruh kabupaten/kota. e. Jemaah haji yang diberangkatkan pada tahun 1446 H/2025 M adalah sesuai dengan nomor urut porsinya dan peraturan perundang-undangan. f. Menyiapkan simulasi skenario proses embarkasi dan debarkasi jemaah haji, termasuk manajemen risikonya apabila terdapat permasalahan. g. Menyediakan secara lengkap dokumen pendukung seluruh usulan komponen BPIH Tahun 1446 H/2025 M. 	
4.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dirjen PHU; 2. Kepala BPH; 3. Dirut Pertamina; 4. PT Angkasa Pura; 5. Dirjen Imigrasi; 6. PT Airnav; 7. Dirjen Perhubungan Udara; 8. Dirjen Perhubungan Darat. 	RDP Panja BPIH Tahun 1446 H/2025 M Komisi VIII dilaksanakan pada Kamis, 2 Januari 2025 pukul 17.16 s.d. 18.34 WIB dengan agenda Pembahasan Rincian Komponen Penerbangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M.	<p>Pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, Badan Penyelenggaraan Haji RI, Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI, Direktur Utama PT Pertamina, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia, dan Direktur Utama PT Airnav, yang membahas: Komponen Penerbangan dalam BPIH Tahun 1446 H/2025 M, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. PT Pertamina siap mendukung penerbangan haji Indonesia tahun 1446 H/2025 M dengan memberikan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>diskon avtur, yaitu turun Rp80 perliter. Diskon ini lebih besar ketimbang diskon yang diberikan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. PT Angkasa Pura Indonesia juga siap memberikan diskon terhadap jemaah haji. <i>Passenger service</i> yang dikenakan kepada jemaah haji lebih rendah dari <i>passenger service</i> yang dikenakan kepada penumpang internasional. 3. Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI siap menyediakan layanan ekstra kepada jemaah haji Indonesia. Bahkan Ditjen Imigrasi siap membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu tanpa ada tambahan biaya. Jadi, biaya keimigrasian yang dikenakan kepada jemaah haji adalah hanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 4. PT Airnav siap mendukung penerbangan haji Indonesia pada tahun 1446 H/2025 M tanpa memungut keuntungan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan terkait navigasi dan keamanan. 5. Kementerian Perhubungan RI mendukung penerbangan dan transportasi darat haji Indonesia, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan dan pengawasan kelaikan, kenyamanan, dan keamanan penerbangan haji Indonesia. b. Kementerian Perhubungan RI juga akan melakukan pengawasan penerbangan haji di Arab Saudi. c. Kementerian Perhubungan RI juga akan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Agama RI untuk memastikan penerbangan haji yang aman dan nyaman demi keselamatan jemaah haji. d. Kementerian Perhubungan RI juga akan mengadakan perjanjian dengan otoritas penerbangan Arab Saudi 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>untuk memastikan penerbangan haji Indonesia yang aman dan nyaman.</p> <p>e. Kementerian Perhubungan RI juga akan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Agama RI untuk memastikan transportasi darat jemaah haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.</p> <p>6. Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI harus melarang orang Islam Indonesia bepergian ke Arab Saudi dengan menggunakan visa ziarah dan/atau visa umrah menjelang penyelenggaraan ibadah haji.</p>	
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirut PT Garuda Indonesia; 2. Dirut Citilink; 3. Dirut PT Lion Air; 4. Saudi Airlines. 	<p>RDP Panja BPIH Tahun 1446 H/2025 M Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada Kamis, 2 Januari 2025 pukul 19.36 s/d 21.22 WIB dengan agenda Pembahasan Rincian Komponen Biaya Penerbangan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M.</p>	<p>Pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, Direktur Utama PT. Lion Air, Direktur Utama PT. Citilink Indonesia, dan Direktur Utama PT. Saudi Airlines, yang membahas Rincian Komponen Biaya Penerbangan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Citilink mengaku tidak siap untuk melayani penerbangan haji karena keterbatasan armada sehingga memilih untuk mendukung PT. Garuda Indonesia sebagai maskapai yang melayani penerbangan untuk jemaah haji Indonesia. 2. PT. Garuda Indonesia siap melayani penerbangan dari 9 embarkasi, dengan 282 kloter yang didukung 15 pesawat untuk melayani 103.267 jemaah haji. PT. Garuda Indonesia mengenakan tarif penerbangan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Tiket perjalanan udara meliputi keberangkatan pergi-pulang Indonesia-Arab Saudi. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> b. Transportasi darat jamaah dan bagasi, dari asrama menuju bandara pulang-pergi. c. Satu set koper beserta distribusinya ke 34 Kantor Wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia. d. Air zamzam dan distribusinya dari bandara ke asrama haji. e. Layanan bagasi jamaah dari asrama haji domestik ke fase keberangkatan dan kepulangan. f. Santunan untuk jamaah meninggal di area airport dan pesawat pada saat keberangkatan maupun kepulangan. <p>3. PT. Lion Air sudah melayani jamaah umrah sejak tahun 2009 dan pada tahun 2011 mendapat kepercayaan dari Flynas Arab Saudi untuk melayani jamaah haji dari Afrika dan Eropa. Artinya sudah 13 tahun melayani jamaah ke Arab Saudi. PT. Lion sudah melengkapi persyaratan administratif dan teknis berdasarkan KMA 1197 untuk dapat menjadi maskapai yang melayani jamaah haji pada tahun 1446 H/2025 M. PT. Lion juga menyediakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebanyak 10 pesawat milik sendiri dengan usia rata-rata di bawah 10 tahun termasuk pesawat cadangannya. b. Kelengkapan seperti 4 tas dan 1 dus dengan logo Kementerian Agama RI dan logo maskapai penerbangan. c. Sebanyak 2 kali hot meal dan 1 kali light meal. d. Fitur hiburan di dalam pesawat atau <i>inflight entertainment</i> termasuk berkomunikasi dalam group whatsapp. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. PT. Saudi Airlines melayani penerbangan haji dari Indonesia sejak tahun 1999. PT. Saudi Airlines memiliki 5 kali penerbangan sehari dari Jakarta dan 2 kali seminggu dari Medan, serta rute dari Surabaya serta rute lainnya yang akan dibuka dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk penerbangan haji rinciannya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pada fase keberangkatan, penerbangan dari Indonesia-Madinah pada tanggal 2-16 Mei 2025 dan dari Indonesia-Jedah pada tanggal 17-31 Mei 2025. b. Pada fase kepulangan, penerbangan dari Jeddah-Indonesia pada tanggal 11-25 Juni 2025 dan dari Madinah-Indonesia 26 Juni – 10 Juli 2025. c. PT. Saudi Airlines akan melayani penerbangan dari 6 embarkasi yakni Batam, Palembang, Jakarta, Kertajati dan Surabaya dengan jumlah 101.100 jamaah. d. PT. Saudi Airlines telah menyampaikan tarif dan biaya penerbangan ibadah haji kepada Kementerian Agama RI pada tanggal 27 Desember 2024. <p>5. Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1446 H/2025 M meminta semua maskapai penerbangan yang ikut dalam kompetisi untuk menjadi penyedia layanan penerbangan haji agar memberikan penawaran biaya penerbangan haji. Pimpinan dan Anggota Panja juga memberikan catatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari keterlambatan penerbangan (<i>delayed</i>) yang disebabkan oleh manajemen operasional, kondisi pesawat, dan jadwal. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> b. Membuat simulasi untuk memangkas masa tinggal di Arab Saudi sehingga dapat berdampak pada pengurangan nilai BPIH tahun 1446 H/2025 M. c. Memberi pelayanan yang manusiawi dan memudahkan bagi jemaah haji lansia dan disabilitas. d. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH tahun 1446 H/2025 M meminta Kementerian Agama RI untuk menurunkan penawaran biaya penerbangan haji di bawah Rp30juta per jemaah. e. Keputusan biaya penerbangan haji harus segera diajukan sebab Panja Komisi VIII DPR RI akan menetapkan BPIH tahun 1446 H/2025 M sebelum tanggal 10 Januari 2025. f. Memberikan pelayanan yang memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan keamanan jemaah haji. 	
6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen PHU Kemenag RI; 2. Kepala BPH; dan 3. Kepala Puskes Haji Kemenkes RI 	RDP Panja BPIH Tahun 1446 H/2025 M Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada Jumat, 3 Januari 2025 pukul 14.09 s.d. 16.34 WIB dengan agenda Pembahasan Komponen Biaya Kesehatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M.	<p>Pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Badan Penyelenggara Haji RI, dan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, yang membahas: Komponen Kesehatan dalam BPIH Tahun 1446 H/2025 M, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Indonesia akan terus mendorong untuk memperkuat kesehatan jemaah haji Indonesia, melalui pemeriksaan <i>istitha'ah</i> kesehatan haji. Namun, pemeriksaan <i>istitha'ah</i> kesehatan terhadap calon jemaah haji harus dilaksanakan secara obyektif. 2. Calon jemaah haji Indonesia yang akan berangkat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M dan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>telah diverifikasi oleh Kementerian Agama RI hingga bulan Januari 2025 telah mencapai 94 %. Calon jemaah haji yang telah diverifikasi tersebut dilakukan pemeriksaan <i>istitha'ah</i> kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Berdasarkan informasi yang didapat oleh Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi, walau masih menunggu surat resminya, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M akan diberlakukan kebijakan pembatasan usia jemaah haji yang berusia 90 tahun ke atas. Namun, kebijakan ini perlu dinegosiasikan dengan Pemerintah Arab Saudi, mengingat banyaknya calon jemaah haji Indonesia yang masuk kategori lanjut usia (Lansia). 4. Untuk menyeragamkan biaya pemeriksaan <i>istitha'ah</i> kesehatan haji, Kementerian Agama RI dan Badan Penyelenggara Haji RI telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI agar membuat edaran yang ditujukan kepada fasilitas kesehatan (rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan klinik kesehatan) yang melakukan pemeriksaan <i>istitha'ah</i> kesehatan haji mengenai standar biaya yang dapat dibebankan kepada calon jemaah haji. 5. Kementerian Kesehatan RI harus memiliki standar mengenai pemeriksaan <i>istitha'ah</i> kesehatan haji, seperti mekanisme pemeriksaan, fasilitas, alat pemeriksaan, kompetensi sumber daya manusia, dan lainnya. 6. <i>Treatment</i> kesehatan terhadap jemaah haji Lansia harus dilakukan secara maksimal mengingat <i>tagline</i> penyelenggaraan haji yang dicanangkan oleh Pemerintah adalah haji ramah lansia. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>7. Kementerian Agama RI harus memasukkan materi mengenai kesehatan haji harus dimasukkan ke dalam materi manasik haji.</p> <p>8. Anggaran kesehatan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M yang telah dialokasikan dari APBN adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penugasan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan PPIH Kloter sebesar Rp220.573.390.000 (<i>dua ratus dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah</i>). b. Operasional Kesehatan di Arab Saudi sebesar Rp49.935.342.000 (<i>empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah</i>). c. Anggaran vaksin, obat dan perbekkes haji sebesar Rp115.410.485.000 (<i>seratus lima belas miliar empat ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah</i>). d. Pelatihan kompetensi dan integrasi Tim Kesehatan Haji (TKH) sebesar Rp18.568.264.000 (<i>delapan belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah</i>). e. Pelatihan Kompetensi dan Integrasi PPIH Bidang Kesehatan sebesar Rp 3.667.500.000 (<i>tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah</i>). <p>Jadi, total anggaran kesehatan haji untuk tahun 1446 H/2025 adalah sebesar Rp 417.001.091.000 (<i>empat ratus tujuh belas miliar satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah</i>).</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>9. Anggaran biaya Masyair untuk petugas kesehatan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M yang diproyeksikan sebesar Rp45.714.549.510 (<i>empat puluh lima miliar tujuh ratus empat belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah</i>) belum dialokasikan di dalam APBN, karena itu harus diselesaikan tanpa membebani kementerian/lembaga lain. Namun, kepastian kebutuhan anggaran ini masih menunggu kebijakan final dari Pemerintah Arab Saudi.</p> <p>10. Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah hendaknya pindah ke lokasi lain, mengingat sanitasi KKHI Makkah yang sekarang berlokasi di Khalidiyah tidak baik.</p>	
7.	BP BPKH	RDP Panja BPIH Tahun 1446 H/2025 M Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada Jumat, 3 Januari 2025 Pukul 17.00 s.d. 18.15 WIB dengan agenda Masukan Terhadap Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/ 2025 M.	<p>Pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M dengan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang membahas Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saldo dana haji sampai November 2024 tercatat sebesar Rp170,23Triliun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,28 persen per tahun; 2. Rasio keuangan BPKH sampai November 2024 mencapai 2,13 kali untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji; 3. Komposisi Bipih dengan Nilai Manfaat sejak tahun 2010 berkisar 70:30 persen namun pada tahun 2022 berbalik menjadi 40,9 persen Bipih dan 59,2 persen Nilai Manfaat sehingga perlu penyesuaian untuk menjaga sustainabilitas dana haji; 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			4. Perlu perhatian atas asumsi kurs valas dalam penyusunan BPIH karena potensi terjadinya fluktuasi pasar akibat geopolitik global.	
8.	1. Dirjen PHU; 2. Kepala BPH; 3. PT Garuda Indonesia; 5. PT Lion Air; 6. Saudi Airline; 7. BPKH; 8. Dewas BPKH	RDP Panja BPIH Tahun 1446 H/2025 M Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada Senin, 6 Januari 2025 pukul 11.17 s.d. 18.30 WIB, dengan agenda: 1. Pembahasan Rincian Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M; 2. Pengambilan Keputusan Panja BPIH Tahun 1446 H/2025 M Komisi VIII DPR RI dengan Panja BPIH Pemerintah.	Pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, Badan Penyelenggaraan Haji RI, PT. Garuda Indonesia, PT. Lion Air, PT. Saudi Airlines, dan BPKH yang membahas Rincian Komponen BPIH Tahun 1446 H/2025 M dan Pengambilan Keputusan PANJA Komisi VIII DPR RI dengan PANJA Pemerintah mengenai BPIH Tahun 1446 H/ 2025 M., dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut: 1. Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah menyepakati asumsi dasar BPIH Tahun 1446 H/2025 M sebagai berikut: a. Kuota haji Indonesia tahun 1446 H/2025 M sebanyak 221.000 jemaah, dengan rincian: 1) Kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah yang terdiri dari: reguler murni sebanyak 201.063 jemaah, Petugas Haji Daerah (PHD) sebanyak 1.572 jemaah, dan Tim Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sebanyak 685 jemaah. 2) Kuota haji khusus sebanyak 17.680 jemaah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. b. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat (USD) dan Saudi Arabian Riyal (SAR)	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPIH adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 USD sebesar Rp16.000,00 (<i>enam belas ribu koma nol nol rupiah</i>). 2) 1 SAR sebesar Rp4.266,67 (<i>empat ribu dua ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah</i>). <p>c. Transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi menggunakan mata uang Saudi Arabia Riyal (SAR).</p> <p>2. Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH Tahun 1446 H/2025 M per jemaah haji reguler sebesar Rp89.410.258,79 (<i>delapan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah</i>), turun sebesar Rp4.000.027,21 (<i>empat juta dua puluh tujuh koma dua puluh satu rupiah</i>) dari BPIH Tahun 1445 H/2024 M yang sebesar Rp93.410.286 (<i>sembilan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah</i>) per jemaah. Komposisi BPIH Tahun 1446 H/2025 M terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.508,01 (<i>tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan koma nol satu rupiah</i>) atau sebesar 38% dari rata-rata BPIH Tahun 1446 H/2025 M dan dialokasikan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Dalam Negeri. Total Nilai Manfaat yang digunakan untuk BPIH Tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp6.831.820.756.658,34 (<i>enam triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus</i> 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah</i>) turun sebesar Rp1.368.219.881.908,86 (<i>satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan koma delapan puluh enam rupiah</i>) dari total Nilai Manfaat untuk BPIH Tahun 1445 H/2024 M yang sebesar Rp8.200.040.638.567,20 (<i>delapan triliun dua ratus miliar empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh koma dua puluh rupiah</i>).</p> <p>b. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp55.431.750,78 (<i>lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh koma tujuh puluh delapan rupiah</i>) atau sebesar 62% dari BPIH Tahun 1446 H/2025 M dan dialokasikan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, dan <i>living cost</i>. Bipih Tahun 1446 H/2025 M turun sebesar Rp614.420,82 (<i>enam ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh koma delapan puluh dua rupiah</i>) dari Bipih Tahun 1445 H/2024 M yang sebesar Rp56.046.171,60 (<i>lima puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu koma enam puluh rupiah</i>).</p> <p>3. Panja Komisi VIII DPR RI menyetujui bahwa total transfer dana BPIH Tahun 1446 H/2025 M yang dilakukan oleh BPKH kepada Kementerian Agama RI (Cq. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah) harus</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dikurangi atau memperhitungkan uang muka untuk biaya tenda Armuzna sebesar SAR159.250.390 sebagaimana Keputusan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI pada tanggal 30 Desember 2024 yang telah dibayar/ditransfer oleh BPKH kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.</p> <p>4. Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah sepakat bahwa pelunasan Bipih dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal dan besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah serta dapat dicicil hingga batas akhir pelunasan.</p> <p>5. Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah menyepakati penggunaan nilai manfaat setoran awal BPIH Khusus untuk mendukung pelayanan kepada jemaah haji khusus tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp9.490.138.000 (<i>sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah</i>).</p> <p>6. Mengingat proyeksi Nilai Manfaat pengelolaan keuangan haji tahun 2025 mengalami perubahan dari yang telah disetujui oleh Komisi VIII DPR RI pada tanggal 24 September 2024, maka Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan kembali terhadap target proyeksi Nilai Manfaat pengelolaan keuangan haji tahun 2025.</p> <p>7. Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama RI, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI menyepakati:</p> <p>a. Bipih untuk Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing KBIHU tidak mendapat dukungan dari dana nilai manfaat keuangan haji, sehingga besaran rata-rata</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Bipih untuk PHD dan Pembimbing KBIHU Tahun 1446 H/2025 M adalah sebesar sebesar Rp89.410.258,79 (delapan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah) per jamaah.</p> <p>b. Living cost yang sebesar SAR750,00 (tujuh ratus lima puluh koma nol nol riyal Arab Saudi) dikembalikan kepada jemaah haji reguler murni, PHD, dan KBIHU dalam mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR).</p> <p>c. Pembayaran komponen biaya penerbangan dapat dilakukan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Jumlah lama masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi rata-rata 41 (empat puluh satu) hari.</p> <p>e. Jumlah makan di Madinah sebanyak 27 kali dan di Makkah sebanyak 84 kali (termasuk pada hari menjelang dan setelah Armuzna).</p> <p>f. Menu katering untuk jemaah haji harus bercita rasa Nusantara dan dioptimalkan secara sungguh-sungguh berbahan baku serta juru masaknya berasal dari Indonesia.</p> <p>g. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada jemaah haji dan optimalisasi penyerapan anggaran, dapat dilakukan realokasi/pergeseran antar komponen anggaran yang telah ditetapkan, yang diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.</p> <p>8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Haji dan Umrah, Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama RI, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI menyepakati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kuota untuk petugas haji sesuai alokasi dari Pemerintah Arab Saudi paling sedikit 2.210 orang dan mendesak Pemerintah untuk melakukan diplomasi kepada Pemerintah Arab Saudi untuk mengupayakan penambahan petugas haji. b. Jumlah kuota untuk pengawas adalah sebanyak 4% dari total jumlah petugas haji. <p>9. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mempercepat proses penerbitan Keputusan Presiden RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M. b. Memastikan bahwa pembinaan, perlindungan, dan pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M lebih baik dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M. c. Melakukan lobi intensif kepada Pemerintah Arab Saudi terkait dengan rencana kebijakan pembatasan jemaah haji yang berumur di atas 90 (sembilan puluh) tahun, karena akan berdampak terhadap calon jemaah haji Indonesia. d. Mengelola BPIH dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji secara transparan, bertanggung jawab, efektif, dan efisien. e. Memastikan bahwa petugas haji melaksanakan tugasnya secara profesional dan berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal kepada 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>jemaah haji Indonesia.</p> <p>f. Mempertimbangkan pengurangan durasi lama tinggal jemaah haji di Arab Saudi sehingga berkontribusi terhadap besaran BPIH.</p> <p>g. Melakukan kajian terkait pelaksanaan dam haji dapat dilaksanakan di tanah air.</p> <p>h. Penyelenggaraan ibadah haji menghadapi berbagai tantangan sehingga Pemerintah harus mempersiapkan skenario <i>force majeure</i>.</p>	
9.	Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam	<p>Rapat Koordinasi Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada Selasa, 7 Januari 2025 pukul 09.44 s.d. 10.37 WIB dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Pelaksanaan Tim Pengawas Haji DPR RI Tahun 1446 H/2025 M; 2. Isu-isu aktual. 	<p>Pada Rapat Koordinasi Panja Komisi VIII DPR RI Mengenai Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M dengan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengenai Persiapan Pelaksanaan Tim Pengawas Haji DPR RI Tahun 1446 H/2025 M, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia layanan di Arab Saudi (vendor) harus terbuka dan terdiri dari banyak pihak agar tercipta iklim persaingan yang sehat, bebas monopoli, serta pelayanan yang lebih optimal bagi para jemaah. 2. Mendorong agar layanan transportasi, termasuk pemilihan maskapai juga bebas dari praktik monopoli. Hal ini dilakukan juga untuk menciptakan persaingan yang sehat serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. 3. Keseimbangan komposisi antara jemaah haji reguler murni dengan petugas haji harus proporsional agar pelayanan yang diberikan juga dapat lebih optimal. Maka pemerintah harus melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk kemungkinan adanya penambahan kuota bagi petugas haji. 4. Petugas haji yang berasal dari satuan TNI/Polri perlu untuk ditingkatkan. Pengalaman dan kemampuan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>TNI/Polri untuk melakukan tugas-tugas di lapangan dapat menjadi modal penting dalam peningkatan layanan kepada jemaah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Presiden telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama RI dan Badan Penyelenggara Haji RI agar dapat menyelenggarakan ibadah haji tahun 1446 H/ 2025 M dengan transparan dan akuntabel. 6. Antisipasi adanya jemaah dengan Visa Ziarah harus dilakukan dengan berbagai pihak. Pentingnya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerin Imigrasi dan Pemasarakatan agar persoalan Visa Ziarah dapat diantisipasi secara lintas sektoral. 7. Gagasan tentang Kampung Haji dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar dapat ditindaklanjuti dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait, karena gagasan tersebut telah ditangkap sangat positif oleh masyarakat luas. 8. Pengadaan obat perlu dilakukan penyesuaian terhadap kondisi Arab Saudi. Kebutuhan vitamin, antibiotik, anti-virus, dan lain sebagainya harus disesuaikan karena suhu, bakteri, maupun virus di Arab Saudi tentu berbeda dengan kondisi di Indonesia. 9. Kelayakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) perlu ditingkatkan, baik sarana dan prasarana maupun pelayanannya. 10. Persoalan keterbatasan area di Mina perlu segera diselesaikan agar bertambahnya kuota jemaah haji Indonesia di masa yang akan datang tidak menjadi 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>persoalan serius dalam hal akomodasi dan kelayakan daya tampung bagi jemaah.</p> <p>11. Rencana tentang pengurangan masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi menjadi maksimal 31 hari dapat mengurangi beban biaya per jemaah. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai infrastruktur pendukung seperti Bandara dan jumlah maskapai yang lebih memadai agar hal tersebut dapat terlaksana.</p> <p>12. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa beliau telah membentuk tim pengawas lokal di Arab Saudi, yang akan berpartisipasi dalam melakukan pengawasan di titik-titik krusial saat penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/ 2025 M.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Badan Gizi Nasional	Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan agenda Persetujuan RKA-K/L Badan Gizi Nasional TA 2025 dilaksanakan pada Senin, 6 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.	Rapat Tertutup.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025	Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Riau, Jawa Timur dan Kalimantan Timur dilaksanakan pada 6-10 Desember 2024.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI. b. Mendapatkan informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN. c. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Riau, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi Riau, Jawa Timur dan Kalimantan Timur secara umum guna perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.	
2.	DPRD Provisini Sulawesi Utara	RDPU dalam rangka Penyampaian Aspirasi Masyarakat terkait Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan pada Rabu, 15 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB.	Komisi IX DPR RI menerima masukan dari DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terkait aspirasi masyarakat mengenai Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI yaitu Badan Gizi Nasional (BGN).	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Reses	Tanggal 6—10 Desember 2024 Kunker Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 Komisi X DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua.	Rekomendasi Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): 1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikdasmen RI untuk: (a) memiliki data akurat sekolah yang rusak berat dan rusak sedang di Provinsi NTT; (b) segera membantu sekolah yang mengalami rusak berat; (c) segera membantu SMPN 7 Kupang Tengah untuk membangun gedung ruang kelas yang layak; (d) membantu SMPN 2 Kupang Timur untuk merenovasi ruang kelas yang rusak sedang. 2. Komisi X DPR RI mendesak Kemdiktisaintek RI untuk: (a) Berkoordinasi dengan Pemda Provinsi NTT mengenai mahasiswa yang keluarganya terdampak erupsi Lewotobi Laki-Laki, baik mahasiswa yang kuliah NTT maupun di luar NTT, agar diberikan bantuan untuk bisa tetap melanjutkan kuliah; (b) melakukan evaluasi menyeluruh terkait implementasi akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri (LAM) yang dipandang PTS di NTT sangat membebani dan memberatkan dari segi pembiayaan; (3) berkoordinasi dengan	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pemda NTT agar dapat terbuka untuk melakukan kerja sama dengan PTS dalam pengembangan program akademik yang relevan dengan kebutuhan daerah, termasuk pelatihan keterampilan dan penelitian terapan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Kebudayaan RI (a) berkoordinasi dengan Kemenkeu RI agar DAK bidang kebudayaan tidak hanya dikhususkan untuk Taman Budaya atau Museum, namun juga dapat digunakan untuk 10 objek pemajuan kebudayaan (OPK); (b) untuk membantu pengembangan digitalisasi museum NTT; (c) membantu pemda NTT agar motif-motif tenun NTT memiliki hak cipta. 4. Komisi X DPR RI mendorong BRIN RI untuk; (a) mengoptimalkan kontribusi IPTEK dan Inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi; (b) merumuskan perencanaan mengenai penegasan peran badan riset di daerah. 5. Komisi X DPR RI mendorong BPS RI untuk merumuskan regulasi mengenai penguatan perlindungan hukum bagi petugas lapangan terutama pada responden dengan karakteristik survei berbasis usaha. Hal ini penting dalam upaya peningkatan <i>respons rate</i> serta memberikan kepastian hukum yang mendorong keterbukaan dan akurasi data sesuai kebutuhan statistik nasional dan juga daerah. 6. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk; (a) berkoordinasi dengan KWARNAS Gerakan Pramuka, terkait kekurangan dan kebutuhan pembina pramuka yang memenuhi kualifikasi untuk menjawab tuntutan pembangunan kepramukaan di daerah; (b) membantu pengembangan pembinaan atlet dan pembangunan infrastruktur olahraga. 7. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk; (a) membantu akreditasi perpustakaan umum, perpusatakaan 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Desa/Kelurahan, perpustakaan Sekolah, perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus, mengingat yang ter-akreditasi baru mencapai 0,009 persen; (b) membantu peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga perpustakaan; (c) berkoordinasi dengan Kemendes agar pemanfaatan dana desa dapat digunakan untuk kegiatan peningkatan literasi.</p> <p>Rekomendasi Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Maluku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperhatikan dan menyelesaikan segera permasalahan dibidang Dikdasmen, antara lain terkait (1) perekrutan guru ASN untuk sekolah swasta, dan Guru SLB di Provinsi Maluku agar segera ditambah serta kualifikasinya (2) dukungan bagi sarpras sekolah, dan (3) perhatian terhadap permasalahan pendidikan non-formal. 2. Mendesak Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperhatikan permasalahan dibidang pendidikan tinggi, yaitu (1) memperkuat program pemberdayaan sarjana-sarjana Maluku untuk membangun daerah sendiri (transmigrasi di kampung sendiri); (2) perlunya penambahan Beasiswa dan KIP Kuliah bagi mahasiswa (dan afirmasi mahasiswa miskin) untuk anak Maluku. 3. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Maluku dibidang Pemuda dan Olahraga untuk lebih memberikan perhatian terhadap permasalahan pembangunan fasilitas olahraga dan Stadion Mandala Remaja. 4. Mendorong Pemerintah dan Pemprov Maluku dibidang perpustakaan untuk lebih memberikan perhatian terhadap permasalahan literasi di provinsi Maluku, melalui kerja sama dalam pengembangan perpustakaan sekolah, perguruan 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tinggi, dengan perpustakaan masyarakat maupun taman bacaan masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mendesak pemerintah dan pemerintah daerah provinsi Maluku agar segera membangun perpustakaan di Kota Tual serta ruang – ruang baca di titik desa, dengan koleksi bacaan bermutu dilengkapi buku – buku <i>life skill</i> berbasis inklusi sosial. 6. Mendorong Pemerintah Provinsi Maluku untuk bersinergi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dengan harapan memaksimalkan ekosistem inovasi riset termasuk juga mendorong pendirian BRIDA di Provinsi Maluku. 7. Mendorong Pemerintah untuk memperkuat pelibatan Perguruan Tinggi dan peneliti daerah, khususnya peneliti di Provinsi Maluku, dalam riset/penelitian yang terkait langsung dengan permasalahan Maluku. <p>Rekomendasi Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Papua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pendidikan Usia Dini, Dasar Menengah, dan SLB: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendorong kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua untuk memperhatikan dan menyelesaikan segera permasalahan umum yang terjadi, antara lain terkait (1) perekrutan guru ASN untuk sekolah swasta, dan penggantian guru SLB dan SMK yang akan memasuki masa pensiun; (2) dukungan bagi sarpras sekolah, seperti asrama dan bis sekolah; dan (3) perhatian terhadap permasalahan pendidikan non-formal. 2) Mendesak kepada Pemerintah untuk melakukan revisi PP No. 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, diantaranya agar pengelolaan pendidikan 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dasar menengah tetap dilaksanakan oleh kab/kota, sedangkan pendidikan atas dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.</p> <p>2. Pendidikan Tinggi: Mendesak Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua untuk memperhatikan permasalahan umum yang ada, yaitu (1) memperkuat program pemberdayaan sarjana-sarjana Papua untuk membangun daerah sendiri (transmigrasi di kampung sendiri); (2) perlunya penambahan Beasiswa dan KIP Kuliah bagi mahasiswa (dan afirmasi mahasiswa miskin) untuk anak Papua; dan (3) mempermudah proses akreditasi Program Studi Vokasi di Uncen dan pengembangan Prodi baru di Politeknik Penerbangan Jayapura.</p> <p>3. Pemuda dan Olahraga: Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Papua untuk mengoptimalkan penggunaan sarana olahraga bekas PON 2021 dan melibatkan peran pemuda dalam kegiatan yang kewirausahaan maupun pengelolaan aset daerah oleh para pemuda.</p> <p>4. Perpustakaan:</p> <p>1) Mendorong Pemerintah dan Pemprov Papua untuk lebih memberikan perhatian terhadap permasalahan literasi di Papua, melalui kerja sama dalam pengembangan perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, dengan perpustakaan masyarakat maupun taman bacaan masyarakat.</p> <p>2) Mendesak Pemerintah dan Pemprov. Papua untuk segera membangun Perpustakaan Daerah di 2 (dua)</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			kabupaten yang belum memiliki Perpustakaan, yakni Kab. Memberamo Raya, dan Kab. Biak. 3) Riset dan Inovasi: Mendorong Pemerintah untuk memperkuat pelibatan Perguruan Tinggi dan peneliti daerah, khususnya peneliti di Provinsi Papua, dalam riset/penelitian yang terkait langsung dengan permasalahan Papua.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang	Kunjungan Kerja Reses Fungsi Pengawasan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 dilaksanakan pada 6 – 10 Desember 2024.		-
2.	Provinsi D.I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta			
3.	Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya			
4.	Inggris dan Britania Raya (London)	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi XI DPR RI dilaksanakan 15 – 21 Desember 2024.	Dalam rangka meningkatkan Peran Diplomasi dan Fungsi Pengawasan di Sektor Keuangan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Kuwait	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. <i>Courtesy call</i> dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2025, pukul 11.00 WIB.	<i>Courtesy call</i> dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Kuwait dalam rangka silaturahmi dan penguatan kerja sama Bilateral RI-Kuwait dibidang Energi.	
2.	Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Rapat Audiensi dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2025, pukul 12.30 WIB.	Koordinasi dan konsultasi Anggota Komisi I DPRD Kab. Kutai Kartanegara.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunker Reses ke: Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan di Kakanwil Kumham Sumatera Selatan • Peninjauan ke Kantor Imigrasi • Peninjauan ke Rumah Tahanan Perempuan Kelas I • Peninjauan ke Lapas Mata Merah Kelas I <p>Dilaksanakan pada 6-10 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Provinsi Sumatera Selatan mengalami <i>overcapacity</i> sebanyak 122%. Kanwil Kumham Provinsi Sumatera Selatan agar melakukan perbaikan kedepan sesuai dengan pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan mendorong pembuatan Lapas baru. 2. Dirjen Pemasyarakatan harus konsisten memberikan hak-hak dasar warga binaan seperti remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti jelang bebas. Kanwil Kumham Sumsel khususnya terkait pembinaan warga binaan menjadi pelopor dalam melaksanakan program ketahanan pangan Presiden dengan mengelola lahan kosong. 3. Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Kanwil Kumham Sumatera Selatan kenaikan PNBP sebesar 200%. Perlu peningkatan dan trobosan dalam pengelolaan keimigrasian khususnya pembuatan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Paspor oleh karena itu, Kementerian perlu meningkatkan anggaran khususnya untuk pelayanan Keimigrasian di Provinsi Sumatera Selatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Komisi XIII DPR RI mendorong untuk menguatkan kembali adanya Koperasi Induk yang ada di Lapas. 5. Terdapat 3 hal yang menjadi kendala dalam manajemen masyarakat maupun keimigrasian di Sumatera Selatan, yaitu jumlah SDM yang tidak memadai, kurangnya sarana dan prasarana, belum optimalnya <i>Restorative Justice</i>. 6. Kanwil Kumham Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Lapas diseluruh Provinsi Sumatera Selatan agar tetap meneruskan Upaya pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap warga binaan. Seluruh Lapas di Sumatera Selatan ke depan terus melakukan berbagai program inisiasi kerja sama dengan pihak swasta sehingga proses reintegrasi dan kemandirian finansial WBP Ketika selesai menjalankan masa hukumnya. 	
2.	<p>Kunker Reses ke: Sumatera Utara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan di Kakanwil Kumham Sumatera Utara • Peninjauan Lapangan Kantor Imigrasi Medan • Peninjauan Lapangan Lapas Tanjung Gusta <p>Dilaksanakan pada 6-10 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XIII mengapresiasi kesiapan transisi Kementerian Hukum dan HAM kantor Wilayah Sumatera Utara terutama dalam persiapan gedung kantor untuk 4 Kanwil, penataan kelembagaa, penataan SDM dan BMN. 2. Komisi XIII mendorong 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Masyarakat. 3. Komisi XIII mendorong penanganan permasalahan masyarakat yakni penanganan <i>overcrowded</i> dan pemberantasan narkoba dapat diselesaikan. 4. Komisi XIII mengapresiasi pelayanan keimigrasian terutama adanya pembentukan 3 Unit Layanan Paspor 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dan 1 Unit Kerja Keimigrasian serta pembentukan 2 Kanim baru.</p> <p>5. Komisi XIII juga mendorong penegakan hukum imigrasi yang dilakukan oleh Timpora, Operasi Gabungan dan Desa binaan keimigrasian dalam pengawasan orang asing dan penanganan pengungsi luar negeri di wilayah Sumut.</p>	
3.	<p>Kunker Reses ke: Denpasar, Bali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan beserta Jajaran di <i>Ballroom</i> Hotel Harris ▪ Peninjauan Pelayanan Imigrasi dan VoA Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. ▪ Peninjauan Lapas Kerobokan Kec. Kuta Utara kab. Badung Bali. <p>Dilaksanakan pada 6-10 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB.</p>		

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.		Audiensi dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024 pukul 10.00 WIB	Badan Legislasi menerima Kunjungan dari DPRD Kab. Konawe Selatan yang bermaksud untuk melakukan Konsultasi terkait UU No. 6 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. Kesimpulan: - Kepala Bagian Badan Legislasi mengapresiasi kunjungan dari DPRD Kab. Konawe Selatan, berharap masukan-masukan yang diberikan dapat menjadi acuan daerah dalam mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.	
2.		Audiensi dilaksanakan pada Senin, 9 Desember 2024 pukul 10.00 WIB	Badan Legislasi menerima Kunjungan dari DPRD Kab. Jambi terkait pendalaman Tugas Dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Kesimpulan: - Kepala Bagian Badan Legislasi mengapresiasi kunjungan yang dilakukan oleh DPRD Kab. Jambi, berharap agar kunjungan yang dilakukan dapat memberikan penjelasan lebih mendalam terkait Tugas Dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah	
3.		Audiensi dilaksanakan pada Senin, 16 Desember 2024 pukul 10.00 WIB	Badan Legislasi menerima Kunjungan dari DPRD Kab. Lima Puluh Kota, DPRD Kab. Labuhan Batu dan DPRD Kab. Jepara terkait pendalaman Tugas Dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Kesimpulan: - Kepala Bagian Badan Legislasi mengapresiasi kunjungan yang dilakukan oleh DPRD Kab. Lima Puluh Kota, DPRD Kab. Labuhan	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Batu dan DPRD Kab. Jepara, berharap agar kunjungan yang dilakukan dapat memberikan penjelasan lebih mendalam terkait Tugas Dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah	
5.		Audiensi dilaksanakan pada Selasa, 14 Januari 2025 pukul 09.00 WIB	<p>Badan Legislasi menerima Kunjungan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKN Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Garut dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengenai Kewenangan, Tugas, dan Fungsi dari Badan Legislasi.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Badan Legislasi, Bpk Ferdiansyah, S.E., M.M. memberikan informasi terkait dengan aturan-aturan di bidang Pendidikan - Kepala Bagian Badan Legislasi mengapresiasi kunjungan yang dilakukan oleh MGMP PPKN Tingkat SMP se-Kabupaten Garut, berharap agar kunjungan yang dilakukan dapat memberikan penjelasan lebih mendalam terkait Kewenangan, Tugas, dan Fungsi dari Badan Legislasi 	
6.	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Rapat Pimpinan Badan Legislasi dilaksanakan pada Selasa, 14 Januari 2025 pukul 11.00 WIB	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Pimpinan bersama Kapoksi untuk membahas rencana penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TERTUTUP 	
7.	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Rapat Badan Legislasi Dilaksanakan pada Senin, 20 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB	Badan Legislasi mengadakan Rapat Internal (Pleno Baleg) dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan agenda acara presentasi Tim Ahli Baleg kepada Anggota Baleg terkait Draft awal dan poin-poin perubahan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Baleg menyetujui penyusunan RUU yang masuk dalam daftar Kumulatif Terbuka Akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi; - Penyusunan secara lebih mendalam dilakukan oleh Panja, dan Rapat Panja dijadwalkan pada Senin, 20 Januari 2025 pukul 13.00 WIB. 	
8.	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Rapat Panja Dilaksanakan pada Senin, 20 Januari 2025 Pukul 13.00 WIB	Rapat Panja dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan secara tertutup.	
9.		Audiensi dilaksanakan pada Senin, 20 Januari 2025 pukul 13.00 WIB	<p>Badan Legislati menerima Kunjungan dari Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dengan tujuan untuk menyampaikan masukan/pandangan terkait dengan usulan perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua Badan Legislati mengapresiasi kunjungan yang dilakukan dan menerima masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh PWRI 	
10.	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Rapat Badan Legislati Dilaksanakan pada Senin, 20 Januari 2025 Pukul 22.00 WIB	<p>Badan Legislati mengadakan Rapat Internal (Pleno Baleg) dalam rangka Pengambilan Keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima Laporan Ketua Panja penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan pandangan 8 (delapan) Fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-NasDem, F-PKB, F-PKS, F-PAN, dan F-PDemokrat) menyetujui hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB - BKSAP	<i>Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development</i> di Manama, Bahrain dilaksanakan pada 7-9 Desember 2024.	<p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) bersama Wakil Ketua BKSAP, Ravindra Airlangga (F-PGolkar) beserta Anggota BKSAP, Stevano Rizki Adranacus (F-PPDIP) dan Galih Dimuntur Kartasasmita (F-PGolkar) menghadiri Sidang <i>Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development</i> di Manama, Bahrain 7-9 Desember 2024.</p> <p>Sidang membahas sejumlah rancangan resolusi dibidang ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang akan diadopsi pada Sidang Pleno APA.</p> <p>Dalam isu besar pembangunan berkelanjutan khususnya SDGs, BKSAP mendorong agar Parlemen Asia dapat bersinergi dengan pemerintah untuk membangun mekanisme akuntabilitas berskala global dan nasional terkait pelaksanaan SDGs, termasuk dalam upaya pemberantasan kemiskinan, hingga hak atas air dan sanitasi.</p> <p>Dalam pembahasan resolusi isu lingkungan di APA, DPR RI menyoroti tiga hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen negara maju dalam pembiayaan iklim; 2. Perlunya untuk memberi contoh (<i>“lead by example”</i>); 3. Perlunya integrasi demokrasi lingkungan hidup yang merupakan bagian dari Prinsip 10 Deklarasi Rio dalam proses legislasi dan kebijakan. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	KSI – BKSAP	Wakil Ketua BKSAP menghadiri seminar sosialisasi hasil <i>United Nation Climate Change Conference 2024/COP29</i> dilaksanakan pada 9 Desember 2024.	<p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bapak Ravindra Airlangga menghadiri seminar sosialisasi hasil <i>United Nation Climate Change Conference 2024/COP29</i> yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Selasa (9/12).</p> <p>Dalam seminar tersebut disampaikan bahwa BKSAP DPR RI memiliki peran penting kedepannya terkait diplomasi lingkungan. Salah satunya mendorong MRA (<i>Mutual Recognition Agreement</i>) untuk <i>Carbon Trading</i> secara bilateral.</p>	
3.	KSB - BKSAP	Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI ke Swiss dilaksanakan pada 9-15 Desember 2024.	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) mengadakan kunjungan diplomasi ke Swiss pada tanggal 9-15 Desember 2024. Delegasi beranggotakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ravindra Airlangga - Muhammad Husein Fadlulloh - Bramantyo Suwondo - Musa Rajekshah - Amelia Anggraini - Andi Muawiyah Ramly - Syahrul Aidi Maazat - Surya Utama - Hillary Brigitta Lasut <p>Dalam kunjungan tersebut, delegasi mengadakan pertemuan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PTRI Jenewa <p>Delegasi Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Dr. Mardani Ali Sera menemui Wakil Tetap RI di Jenewa Duta Besar Febrian Ruddyard, pada Rabu (11/12/2024). Pertemuan membahas berbagai hal terkait tema diplomasi parlemen yang diusung BKSAP Periode 2024-2029, yakni Berdaya, Berdampak, dan Berpengaruh. BKSAP berkomitme untuk terus mempererat kerja</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>sama dengan <i>Inter-Parliamentary Union</i> (IPU) dan memperkaya wawasan dalam pelaksanaan diplomasi parlemen.</p> <p>Pertemuan ini juga menjadi momen diskusi strategis terkait isu-isu internasional dan politik luar negeri yang relevan, didukung oleh masukan berharga dari Duta Besar RI di Swiss. Melalui diplomasi parlemen, DPR RI terus berupaya menguatkan peran Indonesia di kancah internasional.</p> <p>Delegasi BKSAP juga menghadiri jamuan makan malam kebudayaan di Kantor Perwakilan Tetap RI, Jenewa, pada Selasa (11/12/2024). Melalui kunjungan diplomasi yang dilakukan, diharapkan momen refleksi atas rangkaian kunjungan yang penuh makna bersama PTRI, IPU dan WHO. Bersama kunjungan ini, BKSAP terus berupaya untuk menguatkan komitmennya dalam menghadapi tantangan global melalui diplomasi parlemen, mempererat kerja sama lintas sektor, serta membuka diri akan peluang kolaborasi di masa depan.</p> <p>2. Sekretariat <i>Inter-Parliamentary Union</i> BKSAP DPR RI kembali menegaskan komitmennya untuk berperan aktif di <i>Inter-Parliamentary Union</i> (IPU) dalam menghadapi tantangan global melalui dialog, kerja sama, dan saling pengertian antarbangsa. Sebagai anggota IPU yang telah lama berkiprah, BKSAP menyampaikan rasa bangga atas berbagai pencapaian bersama, termasuk kesuksesan penyelenggaraan konferensi parlemen internasional yang didukung penuh oleh IPU. Hal tersebut terangkum dalam pertemuan Delegasi BKSAP dengan Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong, hari ini (11/12/2024).</p> <p>Dalam kunjungan ini, Delegasi BKSAP mengusulkan peluang kerja sama baru, seperti konferensi parlemen yang melibatkan WHO, FAO, dan IPU</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			pada tahun 2026, serta dialog parlemen skala kecil pada semester kedua tahun 2025.	
4.	KSB - BKSAP	Pertemuan Wakil Ketua BKSAP DPR RI dengan Sekretaris Jenderal International IDEA dilaksanakan pada 12 Desember 2024.	<p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menerima Sekretaris Jenderal International IDEA, Dr. Kevin Casas Zamora pada hari Kamis (12/12/2024).</p> <p>Pada pertemuan tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan bahwa kedepannya BKSAP dan International IDEA terus meningkatkan kerja sama dalam bidang penguatan demokrasi di kawasan Asia Tenggara. BKSAP DPR RI terus menyuarkan pentingnya implementasi <i>5-point Consensus</i> terkait Myanmar pada sidang-sidang AIPA, yang tentunya sejalan dengan komitmen BKSAP dalam mengedepankan demokrasi dan menjaga stabilitas kawasan di ASEAN.</p> <p>Kedua pihak juga meninjau potensi dukungan International IDEA dalam penguatan kerja sama antar-parlemen DPR RI dalam kerangka Inter pares yang diharapkan dapat menjadi medium untuk bertukar pengalaman dan peningkatan kapasitas anggota parlemen maupun pekerja parlemen.</p>	
5.	KSB - BKSAP	Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI ke Mesir dilaksanakan pada 15-22 Desember 2024.	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) mengadakan kunjungan diplomasi ke Mesir pada tanggal 15-22 Desember 2024. Delegasi beranggotakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ravindra Airlangga - Muhammad Husein Fadlulloh - Bramantyo Suwondo - Diah Pikatan O Putri Haprani - Rio A.J. Dondokambey - Robert Jopyy Kardinal - Musa Rajekshah - Marlyn Maisarah - Gulam Mohamad Sharon 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Abdullah - Jazuli Juwaini - Yanuar Arif Wibowo - Verrel Bramasta - Fathi <p>Dalam kunjungan tersebut, delegasi mengadakan pertemuan dengan:</p> <p>1. KBRI Kairo</p> <p>Delegasi Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng dalam rangkaian kunjungannya ke Mesir, melakukan pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Mesir, Dr. (H.C) Lutfi Rauf, M.A. yang didampingi jajaran KBRI antara lain Atase Kebudayaan, Atase Pendidikan dan Atase Pertahanan, pada Selasa (17/12/2024).</p> <p>Dalam pertemuan ini pihak KBRI menyampaikan bahwa komoditas yang saat ini sedang laku di Mesir adalah Kopi terutama dari Lampung dan Malang. Begitu pun neraca perdagangan surplus untuk Indonesia. KBRI juga senantiasa memberikan bantuan promosi bagi UMKM yang melakukan pameran produk produk perdagangan di Mesir.</p> <p>Terkait dengan banyaknya mahasiswa asal Indonesia di Mesir tercatat sekitar 14.000 mahasiswa, maka yang perlu didorong DPR RI adalah adanya perlindungan pelajar dan mahasiswa serta pendampingan atau supervisi.</p> <p>Delegasi DPR RI juga mendorong agar KBRI memberikan kemudahan bagi mahasiswa seperti kemudahan pemberian rekomendasi ijin tinggal, mendorong pendaftaran mahasiswa secara online dan juga mendorong realisasi Asuransi Kesehatan bagi Mahasiswa.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Terkait Palestina, Delegasi menyampaikan bahwa sejak pelantikan, Baik Ketua MPR, Ketua DPR maupun Presiden Prabowo telah memberikan pernyataan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Untuk itu delegasi juga berterima kasih kepada KBRI Mesir yang selalu membantu penyaluran bantuan untuk warga Palestina mengingat salah satu pintu masuk Palestina adalah melalui Mesir.</p> <p>2. Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (PPMI) Ada hari pertama dilaksanakannya kegiatan di tanggal 17 Desember 2024, Delegasi yang dipimpin oleh Ketua BKSAP Dr. Mardani Ali Sera, M. Eng berkesempatan bertemu dengan Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (PPMI) di Mesir, pada Selasa (17/12/2024).</p> <p>PPMI yang diwakili oleh Presidennya langsung yaitu Razi Alif Al Faiz didampingi beberapa Gubernur perwakilan daerah asal mahasiswa dan perwakilan mahasiswa perempuan menyampaikan beberapa aduan kepada delegasi antara lain yaitu perlunya asuransi kesehatan untuk pelajar dan mahasiswa mengingat tingginya biaya perawatan kesehatan di Mesir. Adanya kemudahan layanan kekonsuleran serta peningkatan perlindungan dan keamanan bagi pelajar dan mahasiswa terutama yang baru menjalankan studi di Mesir mengingat banyaknya pelajar dan mahasiswa yang menjadi korban kejahatan di jalanan Mesir akhir akhir ini.</p> <p>Dalam kesempatan ini delegasi mendorong pelajar dan mahasiswa agar tidak terjebak dalam paham paham radikal ataupun paham yang terlalu fanatik sehingga ketika kembali ke Indonesia malah menciptakan pertentangan bahkan di dalam keluarga.</p> <p>Mengakhiri pertemuan, Delegasi berharap pelajar dan mahasiswa ketika kembali ke tanah air tidak hanya berorientasi menjadi Guru atau Dosen,</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tetapi kiranya bisa menciptakan peluang usaha bahkan dapat mendorong peningkatan kerja sama dibidang bisnis antara Indonesia dan Mesir.</p> <p>3. Rektor Universitas Al Azhar Kairo, Prof. Dr. Salamah Daud Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng menyampaikan beberapa pesan kepada jajaran Rektorat Universitas Al Azhar agar menganggap mahasiswa dari Indonesia sebagaimana layaknya anak-anak sendiri, meminta agar membuka seluas luasnya peluang bagi pelajar dan mahasiswa dari Indonesia mengingat Indonesia adalah negara besar dengan 280 juta penduduk dan sekitar 17.500 pulau, sehingga mirip dengan Benua. Disampaikan pula agar Rektorat dapat memperhatikan asuransi kesehatan bekerja sama antara Universitas Al Azhar dengan KBRI Kairo di Mesir.</p> <p>Rektor Al Azhar beserta dengan jajaran menyampaikan apresiasi bahwa mahasiswa-mahasiswa Indonesia adalah mahasiswa mahasiswa teladan, memiliki semangat belajar yang tinggi dan berprestasi. Dari 30.000 mahasiswa asing di Mesir, 14.000 di antaranya berasal dari Indonesia. Al Azhar berdiri sejak tahun 1084 sebagai Universitas yang moderat tanpa agenda politik dengan ilmu syariat dan bahasa Arab sebagai pondasi penting di Al Azhar.</p> <p>Pihak Rektorat akan memberikan perhatian khusus terhadap mahasiswa perempuan dan pemantauan ke seluruh mahasiswa. Ada juga program pengenalan bagi mahasiswa baru.</p> <p>Di akhir pertemuan Rektor Al Azhar menyampaikan akan membuka Fakultas <i>Artificial Technology</i> dan Purbakala Islam dan siap menerima mahasiswa dari Indonesia. Demikian juga program belajar jarak jauh sedang disiapkan. Mengenai asuransi kesehatan, juga sedang disiapkan</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>programnya di bawah pengawasan langsung oleh <i>Grand Syaikh Al Azhar</i>, Syaikh Prof. Dr. Ahmad Thoyib.</p> <p>4. Komisi Luar Negeri Parlemen Mesir Delegasi Kunjungan Diplomasi BKSAP yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera M.Eng diterima langsung oleh Ketua Komisi Luar Negeri Negeri Parlemen Mesir, Kareem Darwis yang didampingi kurang lebih 20 Anggota Komisi Luar Negeri Parlemen Mesir yang berasal dari berbagai partai. Pertemuan berlangsung pada Selasa (17/12/2024).</p> <p>Dalam sambutannya, Kareem Darwis mengemukakan bahwa hubungan kedua negara memiliki sejarah yang sangat panjang. Mesir adalah termasuk Negara yang pertama kali mengakui Kemerdekaan Indonesia. Mesir juga ikut membangun Gerakan Non Blok bersama dengan Indonesia. Parlemen Mesir menyambut dengan hangat kedatangan Delegasi Kunjungan BKSAP DPR RI. Disampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang dicintai oleh Rakyat Mesir mengingat hubungan sejarah dan banyaknya mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studi di Al Azhar. Mahasiswa Indonesia sudah dianggap anak sendiri oleh Masyarakat Mesir.</p> <p>Ketua Delegasi dalam kesempatan menyampaikan sambutan mengundang Parlemen Mesir untuk hadir dalam Sidang PUIC yang akan diselenggarakan pada Bulan Juni 2025.</p> <p>Dalam kunjungan ini, Delegasi Kunjungan Diplomasi BKSAP merupakan Delegasi terbesar pertama yang melakukan kunjungan di periode 2024-2029 karena diikuti oleh 15 Anggota dari 8 Fraksi. Hal ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dari DPR RI terhadap Parlemen Mesir. Begitu juga dengan kedatangan Presiden Prabowo ke Mesir secara bersamaan dengan kunjungan delegasi. Menunjukkan pentingnya Mesir</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>terhadap Indonesia. Hal ini dikarenakan Mesir dan Indonesia sudah menjalin hubungan informal sejak lebih dari 300 tahun yang lalu. Banyak pula tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia yang merupakan alumni Al Azhar di mana saat ini juga ada sekitar 14.000 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al Azhar.</p> <p>Dalam pertemuan ini delegasi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mesir yang senantiasa membantu penyaluran bantuan bagi rakyat Palestina. Presiden RI dan DPR RI selalu menunjukkan dukungan terhadap Palestina dan berharap agar bantuan dapat tepat sasaran. Delegasi juga berharap adanya Perjanjian Bebas Visa yang berlaku secara resiprokal minimal selama 30 hari yang dapat meningkatkan hubungan kedua negara baik dibidang ekonomi, budaya maupun pariwisata. Termasuk di dalamnya adalah kemudahan pemberian Visa belajar dan asuransi kesehatan bagi pelajar dan mahasiswa serta. Kerja sama investasi dan penghapusan kendala dibidang perdagangan juga menjadi fokus Delegasi.</p> <p>Mengakhiri pertemuan, menanggapi masukan Delegasi, Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Mesir menyampaikan Pihaknya berjanji akan menyampaikan dan mendorong usulan bebas visa dan Visa belajar ke Instansi terkait. Terkait keterlibatan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok. Kareem Darwis juga meminta agar terus ditingkatkan selain perlunya penguatan kerja sama Selatan Selatan dalam konteks D8 terkait pembangunan seperti adanya Pertukaran Tenaga Kerja antar kedua negara.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	DPRD Provinsi Riau	Menerima audiensi pada 10 Desember 2024.	Dalam rangka mencari masukan dan informasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kehormatan.	
2.	DPRD Kota Padang	Menerima audiensi pada 11 Desember 2024.	Koordinasi dan konsultasi terkait “Perbandingan Rancangan Peraturan DPRD Kota Padang tentang Kode Etik dan Tata Beracara Setelah Dewan Baru Dilantik Periode 2024-2029”.	
3.	DPRD Kabupaten Kupang	Menerima audiensi pada 13 Desember 2024.	Terkait dengan kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan.	
4.	DPRD Kabupaten Jepara	Menerima audiensi pada 16 Desember 2024.	Kode etik dan tata beracara DPRD sebagai bentuk akuntabilitas Lembaga perwakilan kepada masyarakat.	
5.	DPRD Kabupaten Banyumas	Menerima audiensi pada 16 Desember 2024.	Konsultasi mengenai penerapan peraturan kode etik DPRD.	
6.	DPRD Garut	Menerima audiensi pada 18 Desember 2024.	Konsultasi terkait penyusunan peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan.	
7.	DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan	Menerima audiensi pada 23 Desember 2024.	Dalam rangka konsultasi terkait penyusunan peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan.	
8.	DPRD Kabupaten Cianjur	Menerima audiensi pada 23 Desember 2024.	Koordinasi dan konsultasi terkait peningkatan kapasitas pimpinan DPRD dalam mewujudkan DPRD yang berintegritas.	
9.	DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Menerima audiensi pada 30 Desember 2024.	Konsultasi terkait dengan penanganan pelanggaran kode etik Anggota DPRD.	
10.	DPRD Kabupaten Lampung Timur	Menerima audiensi pada 30 Desember 2024.	Konsultasi tentang tata beracara dan kode etik Badan Kehormatan (BK).	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Luar Negeri	Kunjungan Kerja Luar Negeri dalam rangka Penguatan Kelembagaan: 1. Tanggal 13-17 Desember 2024 ke Republik Uzbekistan. 2. Tanggal 18-22 Desember 2024 ke Federasi Rusia.	Tujuan Kunjungan Kerja luar negeri delegasi BURT DPR RI ini adalah untuk mempelajari dan berdiskusi tentang: 1. Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi parlemen yang telah dipraktikkan oleh parlemen negara lain. 2. Model dan mekanisme komunikasi antara anggota parlemen dengan konstituennya. 3. Manajemen penganggaran parlemen. 4. Manajemen kepegawaian parlemen. 5. Pengelolaan/penataan sarana dan prasarana kawasan kompleks parlemen, serta penataan kawasan kompleks parlemen. 6. Perencanaan dan implementasi <i>e-parliament</i> . 7. Manajemen sistem pendukung (<i>supporting system</i>) Parlemen yang bertugas memberi dukungan keahlian, teknis, dan administratif.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Delegasi Public Accounts Committee (PAC) Parlemen Malaysia	Menerima Kunjungan (<i>Courtesy Call</i>) Delegasi dari Parlemen Malaysia dilaksanakan pada Selasa, 14 Januari 2025, pukul. 10.00 WIB s.d. selesai	<p><i>Courtesy Call Delegasi Public Accounts Committee (PAC) Parliament of Malaysia</i> dengan Pimpinan dan Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dibuka oleh Ketua BAKN DPR RI, Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.</p> <p>Pertemuan dihadiri oleh 10 (sepuluh) dari 19 (sembilan belas) orang Anggota BAKN yang merupakan representasi dari partai dari 83 daerah pemilihan.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delegasi PAC dipimpin Wakil Ketua PAC Malaysia, Puan Teresa Kok Suh Sim, dengan jumlah anggota PAC yang hadir sejumlah 10 (sepuluh) orang; 2. Keseluruhan anggota PAC Malaysia berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) Pimpinan dan 12 (dua belas) anggota; 3. Anggota PAC Malaysia terdiri dari 9 (sembilan) anggota dari partai pemerintah dan 5 (lima) anggota dari partai oposisi yang berasal dari partai pemerintah, akan tetapi sejak tahun 1908, ketua dipegang oleh partai oposisi; 4. Pada tahun 2024, PAC Malaysia telah menyelesaikan 22 laporan. Hasil laporan PAC Malaysia bersifat tertulis dan media dapat memanfaatkan laporan tersebut sebagai bahan berita/laporan. Dari 22 laporan tersebut, 2 sampai 3 laporan akan disampaikan kepada pemerintah. Selanjutnya selama kurang lebih 3 bulan, pemerintah harus 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			menyampaikan kepada PAC Malaysia apakah rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah/pihak terkait lainnya; 5. PAC Malaysia dapat memanggil Kementerian maupun pihak terkait untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara yang melibatkan kepentingan rakyat	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ASPIRASI MASYARAKAT

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Majelis Rakyat Papua	RDPU dalam rangka Mendengarkan aspirasi dari Majelis Rakyat Papua pada 20 November 2025.	<p>A. Majelis Rakyat Papua (MRP):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 yang diperbaharui dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki tugas dan wewenang untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. 2. Untuk menjalankan fungsi serta sebagai wujud dari Otonomi Khusus Papua, MRP membentuk Pansus Gubernur, Pansus Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, serta Pansus Afirmasi yang menangani pengaduan dan aspirasi masyarakat. 3. Afirmasi pada Otonomi Khusus Papua sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia Emas pada tahun 2045 dengan mengedepankan ideologi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu NKRI menjadi bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dari Papua. Oleh karena itu, Majelis Rakyat Papua harus mengawal jalannya Otonomi Khusus Papua sampai pada masa keemasan pada tahun 1945. 4. Dalam pelaksanaan afirmasi tersebut, Majelis Rakyat Papua ingin memastikan adanya kebijakan khusus dari pemangku kepentingan tingkat nasional maupun tingkat Provinsi Papua yang dapat mengutamakan Orang Asli Papua. 	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>5. MRP Sangat mengharapkan agar diutamakannya orang asli Papua dalam penerimaan pekerjaan, baik ASN, TNI, Polri, BUMN maupun sektor swasta agar masyarakat asli Papua dimudahkan menjadi karyawan pada sektor-sektor tersebut.</p> <p>6. MRP juga memohon dukungan agar Masyarakat Papua dapat dikhususkan dalam penerimaan Calon Pendidikan Kedinasan, seperti STPDN, Sekolah BIN, STAN, dan lainnya.</p> <p>7. MRP memohon beberapa nama agar dapat mengisi jabatan tertentu di Pemerintahan, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bapak Anthonius Ayorbaba sebagai Tenaga Ahli atau Direktur Jenderal Kemenkumham RI karena memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi sebagai Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua Barat dan Provinsi Papua. b. Bapak Wempi Romandey sebagai Pangdam TNI, karena merupakan Orang Asli Papua di TNI. 	
2.	<p>Acara IOF 2024 (Festival Aspirasi Indonesia) di Gedung DPR RI, Jakarta</p>	<p>Dialog dan menerima aspirasi dari masya rakat yang terjaring dalam Citizen-OS Indonesia dilaksanakan pada 29 Desember – 30 Desember 2024</p>	<p>Setjen DPR RI bersama Citizen OS menyelenggarakan Indonesia <i>Opinion Festival (IOF)</i> 2024 sebagai forum strategis untuk menampung aspirasi dan gagasan publik. Acara yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan ini dihadiri berbagai kalangan, termasuk generasi muda yang siap memberikan kontribusi pemikiran untuk kemajuan bangsa. Acara ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Festival ini adalah bukti keterbukaan DPR RI dalam mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat. 2. Keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, sangat penting dalam mendorong perubahan positif. 	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			3. Dengan mengusung tema “Apa yang Dapat Kita Lakukan untuk Indonesia yang Lebih Baik”, IOF 2024 menjadi ruang diskusi yang memfasilitasi ide-ide segar dan inovatif. 4. Dengan mengumpulkan berbagai perspektif, kita bisa merancang solusi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan masa depan. 5. DPR RI berkomitmen untuk terus mengakomodasi aspirasi rakyat melalui berbagai platform dialog, baik secara formal maupun informal. Keterlibatan masyarakat yang luas akan memperkuat fungsi representasi DPR dalam memperjuangkan kepentingan publik. 6. IOF 2024 ini bukan sekadar diskusi, tetapi juga wujud kolaborasi antara rakyat dan wakilnya di parlemen sehingga dapat memperkuat budaya dialog dan membangun solusi bersama untuk Indonesia yang lebih baik.	
